

## Presiden: jangan sampai sejarah kekajaman PKI terulang

Akan lebih tepat dan bijaksana seandainya bapak Presiden menegaskan JANGAN SAMPAI TERULANG sejarah KEKEJMANAN KEMANUSIAAN yang dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun! Aparat keamanan dan HUKUM harus ditegakkan secara BENAR! Aparat Keamanan negaralah yang berkemampuan MENCEGAH terjadinya kekejaman kemanusiaan dan menindak TEGAS SIAPAPUN PELAKUNYA! Mengajukan kedepan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dan menjatuhkan sanksi HUKUM seberat-beratnya!

Kenyataan sejarah yang terjadi 52 tahun yg itu, kalau kita berani BELAJAR dan tidak melupakan sejarah, jelas-jelas Jenderal Suharto sebagai Panglima KOSTRAT sudah mengetahui terlebih dahulu rencana rinci penculikkan atas 7 jenderal, tapi mendiamkan bahkan bisa dikatakan MERESTUI! Setidaknya KESALAHAN membiarkan terjadi kekejaman Kemanusiaan terhadap atasannya! Ini pertama.

Kedua, sekalipun presiden Jokowi sudah berhasil buktikan PKI dibalik G30S yang melakukan kekejaman kemanusiaan, juga TETAP tidak seharusnya bisa membenarkan KEKEJAMAN dibalas dengan KEKEJMANAN kemanusiaan, bahkan terjadi lebih kejam lagi! Karena kekejaman kemanusiaan berikut justru terjadi pada RAKYAT tidak berdosa! Bukankah orang-orang itu tidak terlibat G30S, tapi tidak tahu menahu apa itu G30S, walaupun dia anggota PKI! Dan ingat, KEKEJAMAN KEMANUSIAAN itu dilakukan oleh aparat NEGARA! Jenderal Suharto menggunakan aparat negara, TNI untuk melancarkan pengejaran, penangkapan dan pembunuhan terhadap jutaan rakyat tidak berdosa yang dituduh, bahkan diperkirakan komunis dan simpatisan saja!!! Kenapa jenderal Suharto ketika itu, yang telah berfungsi sebagai pemegang mandat untuk menertibkan keamanan, tidak merasa cukup menangkap tokoh-tokoh utama PKI yang jelas terlibat dan harus bertanggungjawab atas G30S kedepan pengadilan??? Tapi jenderal Suharto juga melakukan KESALAHAN yg dituduhkan dilakukan PKI: MEMBUNUH ORANG TANPA PROSES HUKUM! Bahkan lebih lanjut memperluas sasaran sampai jutaan rakyat, warga Indonesia tidak berdosa jatuh KORBAN!

Kekejaman kemanusiaan yang dilakukan NEGARA inilah yang terutama harus disimpulkan sebagai pengalaman sejarah KELAM bangsa ini dan jangan sampai terulang kembali! TIDAK BOLEH TERJADI lagi kekejaman kemanusiaan oleh siapapun dan terhadap siapapun, ...!

Salam,  
ChanCT

## Presiden: jangan sampai sejarah kekajaman PKI terulang

Minggu, 1 Oktober 2017 11:06 WIB | 1.259 Views

Pewarta: Joko Susilo



Presiden Joko Widodo (ANTARA / Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang kembali di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Presiden usai memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta, Minggu.

Untuk itu, kata Jokowi, semua elemen bangsa harus memegang teguh Pancasila dan menjaga kesatuan serta tidak memberi ruang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia.

"Jangan beri ruang ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila. Apalagi memberi ruang terhadap PKI," tegas Presiden.

Jokowi juga menegaskan bahwa posisi pemerintah sangat jelas, yakni memegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.

"Artinya komitmen kita, menurut saya, jelas karena di TAP MPRS nomor 25 tahun 1966

bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Tidak perlu diulang-ulang," katanya.

Dalam kesempatan ini, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa dan memerintahkan TNI-Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tentram serta bersatu padu menghadapi persaingan global.

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara yang dilaksanakan di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu.

Upacara peringatan Hari Kebangkitan Pancasila ini dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi, hadir sejumlah pejabat negara diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sedangkan jajaran TNI-Polri lengkap hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KASAD Jenderal TNI Muljono, KASAL Laksamana TNI Ade Supandi, KASAU Marsekal TNI Hadi Tjakjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Editor: Unggul Tri Ratomo